

## **Keamanan Regional Asia Tenggara Pasca Perjanjian AUKUS dan Implementasinya Pada Ketahanan Wilayah Indonesia**

*Saskia Tasnim Utami*

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Peradaban,  
Universitas Paramadina, Indonesia  
email: [saskia.tasnim@gmail.com](mailto:saskia.tasnim@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Southeast Asia is worried about a nuclear strategy that will lead to an arms race, increasing the potential conflict risk. The purpose of this study is: (1) to analyze the potential possibility of AUKUS agreement's impact on defense and security of the Southeast Asian region; (2) to identify its short- and long-term strategy; and (3) to study its implementation on the resilience of the Indonesian region based on the national resilience concept.*

*The method used in this research is a qualitative research method based on the study of objects and situations and the researcher as the main tool in this research. The method of data collection is by triangulation (combination) and discussions with resource persons and using the theory of neorealism.*

*The results show that the projected strength of the AUKUS Agreement will threaten security and stability in the Southeast Asian region. The AUKUS agreement can weaken ASEAN to preserve a nuclear-free area for international peace and security with the AUKUS agreement making the Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone Treaty unrealized and the authors provide recommendations and projections on how Indonesia should take the attitude related to the AUKUS Agreement in the international world.*

**Keywords:** *Southeast Asia Security; AUKUS Agreement; Indonesian Territorial Resilience; Nuclear Strategy.*

### **ABSTRAK**

Asia Tenggara khawatir atas strategi nuklir yang akan mengakibatkan adanya perlombaan senjata, dan meningkatkan potensi resiko konflik. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis kemungkinan dampak dari perjanjian AUKUS pada kawasan regional Asia Tenggara; (2) mengidentifikasi strategi jangka pendek dan jangka panjangnya; dan (3) mengkaji implementasinya pada ketahanan wilayah Indonesia berdasarkan konsep ketahanan nasional.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berdasarkan kepada studi objek maupun situasi dan peneliti sebagai sarana utama dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dengan cara triangulasi (kombinasi) dan diskusi dengan narasumber serta menggunakan Teori Neorealisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyeksi kekuatan Perjanjian AUKUS akan mengancam keamanan serta stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian AUKUS dapat melemahkan ASEAN untuk melestarikan kawasan bebas nuklir demi perdamaian dan keamanan internasional dengan adanya perjanjian AUKUS ini menjadikan Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara menjadi tidak terealisasi. Peneliti memberikan rekomendasi dan proyeksi tentang sikap yang harus diambil oleh Indonesia terkait dengan Perjanjian AUKUS di dunia internasional.

**Kata Kunci:** *Keamanan Asia Tenggara; Perjanjian AUKUS; Ketahanan Wilayah Indonesia; Strategi Nuklir.*

## **PENGANTAR**

Pertahanan dan keamanan termasuk dua hal yang sangat penting baik itu bagi suatu negara maupun kawasan regional negara-negara yang tergabung di dalamnya. Pertahanan merupakan usaha demi mempertahankan kedaulatan, keutuhan maupun keselamatan suatu negara ataupun kawasan regional dengan menggunakan kuasa ekonomi maupun militer serta diplomasi yang baik dalam keadaan damai ataupun perang. Pertahanan negara memperhitungkan wilayah, kedaulatan, dan individu setiap negara, tetapi dapat dicirikan sebagai sarana utama negara untuk menciptakan keamanan nasional. Kewajiban dan kewenangan negara untuk memberikan keamanan nasional menjadikan pertahanan sebagai elemen penting dari sektor publik. Anggaran perbelanjaan pertahanan dan keamanan nasional sangat penting karena menciptakan kondisi untuk stabilitas nasional, kemajuan ekonomi, politik, sosial, kesehatan serta sistem demokrasi (Cristian Fjader, 2014).

Keamanan yaitu keselamatan berarti bebas dari bahaya, ketakutan dan ancaman. Terdapat dua pendekatan terhadap pengertian keamanan, yaitu pengertian keamanan tradisional dan non-tradisional. Pengertian keamanan tradisional didefinisikan sebagai keamanan suatu negara yang dapat diserbu oleh angkatan bersenjata negara lain maupun aktor tertentu dan harus dilindungi oleh kekuatan militer maupun segala sumberdaya yang dimiliki oleh negara tersebut. Dengan pendekatan ini, negara merupakan subjek dan objek dalam menciptakan keamanan. Pendekatan kedua adalah keamanan non-tradisional, akan tetapi didefinisikan sebagai keamanan yang bergantung pada kebutuhan keamanan aktor non-negara. (Liotta, 2002).

Ketahanan wilayah dalam konsep ketahanan nasional adalah keadaan dinamis

suatu wilayah yang meliputi seluruh aspek kehidupan, mengandung ketahanan dan ketangguhan, termasuk kemampuan mengembangkan kekuatan untuk menghadapi ancaman, hambatan, dan gangguan dari kedua belah pihak baik itu gangguan yang datangnya dari internal maupun eksternal, untuk menjamin jati diri, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan pembangunan. Tingkat kapasitas atau ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman dan hambatan menjadi tolak ukur pertahanan dan keamanan daerah di perbatasan (Hikmawan, 2020).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan perilaku dalam bentuk kata-kata serta bahasa secara keseluruhan, dengan menggunakan berbagai metode dalam konteks alam maupun situasi tertentu (Moleong, 2011). Metode penelitian kualitatif tentu didasarkan pada filosofi post-positivism dan dalam studi objek maupun situasi, dimana peneliti sebagai sarana utamanya. Metode pengumpulan data adalah dengan cara triangulasi (kombinasi). Analisis data bersifat induktif atau objektif dan temuan-temuan yang menekankan bagaimana pentingnya dibandingkan dengan generalisasi yang merujuk pada teori neorealisme (Sugiyono, 2011). Saat ini sudah setengah jalan menuju penghujung tahun 2022, perjanjian AUKUS sudah berjalan selama 1 tahun lebih tetapi kenapa penulis mengangkat masalah ini? Semua berawal dari kekhawatiran penulis dengan terjadinya *proxy war* dikarenakan adanya kompetisi antara 2 kubu pecah perang dan berakibat fatal pada keamanan Kawasan Asia-Pasifik.

Teori neorealisme adalah mempercayai struktur sistem internasional anarki. Artinya bahwa tidak ada kekuasaan atas kekuasaan dan tidak ada pemerintahan atas pemerintah. Struktur sistem internasional ini membentuk kebijakan luar negeri negara, sehingga tidak mengherankan apabila ada negara yang lebih kuat atau negara hegemoni memiliki pengaruh yang lebih besar (N. Waltz, 1979). Bagi negara neorealisme, kekuasaan dipercaya menjadi indera buat mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kekuasaan sebagai instrumen yang menuntun dan membatasi sesuatu hal pada negara-negara lain. Kekuasaan itu sendiri, lebih difokuskan dalam kemampuan penggunaan kekuasaan menjadi pertahanan negara (Baylis, John, 2008).

Konsep *power* juga digunakan dalam penelitian ini. Tujuan-tujuan negara dan kepentingan-kepentingan negara dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Semua aktor negara didorong oleh keinginan untuk kekuasaan. Kekuatan adalah salah satu aspek yang paling penting dari hubungan internasional, dan penting untuk memiliki kehadiran yang kuat di dunia. Negara-negara sistem internasional akan melakukan apa yang mereka ingin mengendalikan secara finansial, bukan apa yang mereka seharusnya lakukan secara moral. Sebuah hasil kombinasi persuasi dan paksaan. Seiring bertambahnya kekuatan negara, kemampuan negara untuk mempengaruhi tetangga, berkembang maju secara ekonomi, dan mengekalkan ketertiban di dalam dan di luar negeri. Kekuatan nasional tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga tingkat kontrol teknologi, sumber daya alam, bentuk pemerintahan, kepemimpinan politik dan ideologi (Yani, 2005). Pemerintah dan individu di negara lain dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi

dan bahkan membuat keputusan tentang kegiatan hukum, politik, ekonomi, internal dan keamanan nasional (Frederich Ratzel, 1988a).

Kebijakan internal suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan keamanan negara lain. Konsep geopolitik penting bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Pertumbuhan organisme yang membutuhkan ruang hidup untuk tumbuh dan berkembang merupakan suatu proses yang dapat melibatkan kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, kelangsungan hidup, reduksi, dan kematian. Kekuatan suatu negara sangat penting untuk pertumbuhannya. Negara yang dapat terus bertahan adalah negara yang menarik diri dari aturan-aturan alam yang berlaku bagi negara-negara dengan tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Apabila ruang hidup negara tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya, ia dapat berkembang dengan mengubah batas-batasnya melintasi jalur kekerasan atau perang (Frederich Ratzel, 1988a). Seluruh pernyataan tersebut dapat terjadi ditambah adanya dorongan ideologi realisme yang mengutamakan kekuatan perang dalam menyelesaikan segala permasalahan.

Perang bersifat keras tetapi dibalik kerasnya perang sesungguhnya harus dipahami bahwa perilaku tersebut untuk menunjukkan keberadaannya yang ingin diakui oleh berbagai pihak. Keberadaan diri umumnya ingin dihargai dan diakui baik oleh pihak yang terdekat maupun yang jauh. Jika tidak diakui keberadaannya maka daya magnet untuk berperang semakin tinggi. Inilah akar masalah yang harus ditemukan pelunaknya. Perang tidak akan terjadi jika saat keberadaan diri seseorang tidak dihargai maka negara maupun bangsa tidak akan dikorbankan. Artinya para pemimpin di dunia saat ini yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dalam sikap dan ideologinya.

Apabila seseorang sudah berbenturan dengan yang salah tentu akhirnya tidak akan menyalurkan suatu nilai yang bermanfaat. Akhirnya busur panah yang seharusnya bersatu menjadi meleset maka terjadinya perang. Solusi dari hal ini adalah bahwa busur panah dalam segala aspek kehidupan harus tepat sasaran yaitu jika busur panah pandangan yang benar bermanfaat bagi busur panah yang salah. Suatu perang tidak dapat terselesaikan apabila pihak yang berperang tidak mau menemukan kedua busur panah artinya untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun konflik maka pihak yang bermasalah tidak hanya memikirkan kelebihan dan kekurangannya saja melainkan hal itu menghasilkan hal baru bukan dari tindakan repressive melainkan tindakan preventive dengan kepala dingin dan pihak yang netral. Seharusnya sebagai pihak netral dapat berperan dengan baik disaat adanya suatu konflik baik konflik bilateral maupun multilateral.

Tidak ada yang sulit jika berpegang teguh pada nilai-nilai yang dibangun atas dasar menjunjung tinggi integritas bangsa dan dunia. Energi yang baik mengandung listrik justru diperoleh dari pertemuan kabel positif dan negatif. Keduanya merupakan nilai yang terus digali sehingga melahirkan suatu nilai yang bermanfaat. Akan tetapi perang terjadi disebabkan akibat adanya keinginan yaitu pandangannya mutlak harus diterima dan menganggap pandangan yang lain salah. Padahal apabila ada kebenaran tentu manfaat dari kebenaran tersebut jika disalurkan kepada yang salah baru disebut manfaat. Semua tindakan yang mengatasnamakan integritas diri dan bangsa akan melahirkan integritas dunia. Menghargai satu nyawa sama dengan menghargai semua nyawa begitu pula sebaliknya melenyapkan satu

nyawa tanpa alasan yang dibenarkan sama halnya melenyapkan banyak nyawa. Untuk itu pertahanan dan keamanan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh integritas diri dan bangsa. Setiap manusia yang berkonflik itu disebabkan pertahanan integritas tersebut korslet dan distorsi serta pecah.

Pertahanan dan Keamanan suatu negara merupakan akumulasi dari setiap individu yang membentuk himpunan baik kecil maupun besar memberi kontribusi dua sisi yang berbenturan atau bersesuaian. Integritas diri setiap individu berdampak pada integritas bangsa dan sebaliknya disintegritas pribadi memberi kontribusi untuk disintegritas bangsa serta dunia. Tidak terkecuali siapapun dia, jika pecah pribadinya atau retak akan menyumbangkan keretakan bagi bangsa dan dunia. Perang regional akan terjadi apabila seluruh komponen bangsa di Asia Tenggara tidak berupaya keras untuk mempertahankan keutuhan serta integritasnya masing-masing.

Mewujudkan integritas diri, bangsa dan Asia Tenggara merupakan hal mendesak bagi individu-individu yang hidup di Asia Tenggara. Membentengi diri pada kawasan Asia Tenggara khususnya serta dunia pada umumnya. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan harmoni dari komponen bangsa-bangsa yang berada di Asia Tenggara maka dapat hidup berdampingan, bertetangga, bersatu padu, kuat dan teguh, yang sudah barang tentu hal ini akan menjadi teladan bagi bangsa yang berada di kawasan regional lainnya. Memberi nilai teladan bagi kawasan regional Asia Tenggara yang utuh tentu akhirnya sangat berdampak besar bagi ketahanan dan pertahanan dunia. Pecahnya pribadi seseorang akan sangat besar memicu perang regional dan bahkan Perang Dunia ke-III.

## PEMBAHASAN

### Perjanjian AUKUS

Inggris, Amerika Serikat dan Australia pada tanggal 15 September 2021 mengesahkan Perjanjian AUKUS. Perjanjian AUKUS merupakan kerjasama trilateral yang memiliki tujuan utama yaitu untuk memperdalam kerjasama diplomatik, pertahanan dan keamanan di antara 3 negara yang secara khusus untuk mendalami integrasi ilmu pengetahuan, basis industri, teknologi (kemampuan *cyber &* kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), teknologi kuantum), rantai pasokan pertahanan, dan kemampuan baru bawah laut maupun serangan jauh (Louisa Brooke, 2021). Pencetus perjanjian AUKUS merupakan sikap yang diambil oleh negara hegemoni dan perjanjian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai *Threats Strategy* yang ditujukan kepada China karena tidak ingin adanya dominasi dari *power state* nomor 3 di dunia internasional (Global Fire Power, 2022).

Melalui pemberian kapal nuklir Australia dan infrastruktur yang diperlukan maka untuk memperbaikinya dengan cara mematuhi kewajiban mitra internasional di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan perlindungan Agensi Energi Atom Internasional. Di satu sisi, itu adalah wasiat untuk hubungan yang kuat antara Australia dan sekutu lamanya yaitu Amerika Serikat. Namun, perkongsian baru antara tiga negara memiliki fokus yang jelas pada kerjasama Indo-Pasifik. Merujuk pada konteks ini, AUKUS melengkapi perkongsian dan upaya kelompok regional lainnya, seperti lima mata dan QUAD, dalam mengembangkan koordinasi di bidang seperti diplomasi, pemerintahan global, keamanan kesehatan, dan pertukaran informasi. Perjanjian AUKUS akan membantu Australia membangun

setidaknya delapan kapal selam nuklir yang menggunakan teknologi canggih serta keahlian khusus dari Amerika Serikat. Hal ini membuat negara tersebut menjauh dari kontrak untuk memasok kapal selam listrik diesel dari Prancis dan mengecewakan negara yang dipimpin oleh Emmanuel Macron. Memiliki kapal selam nuklir untuk berbagai tujuan militer profesional akan memungkinkan Australia untuk melakukan patroli jangka panjang demi menjaga keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

China setelah mengetahui langsung merespon dengan mengajukan permohonan partisipasi dalam perjanjian kemitraan Asia-Pasifik yang komprehensif dan progresif sebagai negara yang kekuatan ekonomi maupun militernya yang telah meningkatkan pengaruhnya secara signifikan di kawasan. Kecurigaan dari langkah tersebut merupakan langkah kompensasi oleh Beijing untuk meningkatkan upaya menuju integrasi ekonomi regional melalui perjanjian perdagangan multilateral, dan melalui multilateralisme ekonomi Amerika Serikat berada di kawasan tersebut. Ini adalah langkah strategis untuk melawan kemungkinan peningkatan resistensi. Sebuah program yang dapat menyebabkan China kehilangan posisi strategisnya di kawasan di masa depan (Martin, 2022). Langkah ini juga sebagai salah satu cara untuk memproyeksikan citra orang-orang yang mematuhi aturan pengembangan, meskipun negara itu telah menyebabkan gejolak di kawasan walaupun sudah memperingatkan negara lain.

Inisiatif kapal selam sudah menjadi fokus utama dan perkongsian AUKUS membawa makna yang jauh lebih luas karena akan melihat Australia, Inggris dan Amerika Serikat bekerja sama dalam banyak bidang kemampuan

pertahanan dan teknologi. Tujuan kerja sama dalam teknologi pertahanan lanjutan sebagai cara memperoleh potensi pembangunan berkelanjutan untuk menetapkan ganjaran strategis bagi wilayah Indo-Pasifik dan membedakan AUKUS dengan perjanjian yang menyediakan pengumpulan data intelijen, misalnya penerbangan lima mata di mana Canberra, London dan Washington merupakan anggota komite bersama dengan Kanada dan Selandia Baru.

Ketiga pemimpin mendefinisikan kecerdasan buatan, kemampuan siber, dan sistem komputerisasi kuantum sebagai prioritas kerjasama, dan solusi tiga negara ini tampaknya memperluas kerjasama untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan militer lainnya, seperti rudal jarak jauh dan sistem kapal selam nuklir (Tom Corben, Ashley Townshend, Susannah Patton, 2022). Australia mencari dukungan & pengetahuan teknis bagaimana mengembangkan *Sovereign Guided Weapons and Explosive Ordnance Enterprise* untuk menghasilkan rudal serang jarak jauh pada Australia, Inggris serta Amerika Serikat sedang menyebarkan kendaraan bawah air tidak berawak (*Unmanned Underwater Vehicle*) agar beroperasi serta beserta-sama menggunakan *platform* berawak dalam misi pengumpulan intelijen & pengintaian (Prime Minister of Australia's Office, 2021).

Muncul pertanyaan apakah Australia memanfaatkan kesempatan tersebut karena submarin nuklir mampu memperkuat kemampuan Canberra untuk mencegah serangan kekuatan besar dan ancaman terhadap kepentingan Australia di Indo-Pasifik. Kapal selam nuklir lebih tenang, lebih cepat, lebih stabil dan memiliki durasi yang lebih lama dan tak terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan kapal selam diesel-

elektrik yang dikembangkan Australia dengan menggunakan teknologi dari Perancis, Maka dari itu memungkinkan Australia untuk mendistribusikan armada bawah laut masa depan di lokasi terpencil di Indo-Pasifik untuk waktu yang lebih lama, termasuk di titik-titik geopolitik tidak hanya di wilayah Asia Tenggara seperti Laut China Selatan dan beberapa Kepulauan Jepang (Tom Corben, Ashley Townshend, Susannah Patton, 2022).

Saat ini tidak jelas apakah Canberra akhirnya akan membangun kapal selam kelas Virginia. Dengan platform yang meningkat hingga mencapai 40 rudal *Tomahawk* dapat dimuat yang memungkinkan Australia secara signifikan meningkatkan kekuatan serangan berbasis kapal selamnya lagi. Hal ini akan menjadikan kontribusi yang mendasar dan memungkinkan pasukan pertahanan Australia untuk mempelajari kemampuan jangka panjang serta memungkinkan Australia untuk secara independen dan kolektif mengganggu pasukan China dalam berbagai skenario regional. Kesepakatan ini dengan inisiatif pertahanan, bukankah membuat orang bertanya-tanya tentang apa alasan dibalikinya.

Program kapal selam nuklir konsisten dengan banyak inisiatif aliansi yang ada dari inisiatif berkelanjutan ini diharapkan dapat mengarah pada peningkatan jumlah kapal selam Amerika Serikat yang beroperasi di Australia melalui *HMAS Sterling* di Australia Barat. Mengoperasikan kapal selam Amerika Serikat di luar Australia secara signifikan mengurangi waktu transit di Guam, Hawaii atau Pasifik Barat Amerika Serikat yang memungkinkan kehadiran militer Amerika Serikat lebih konsisten dan kuat di masa depan dari peningkatan kecepatan operasi serta pemeliharaan kapal selam AS (Tom Corben, Ashley Townshend, Susannah Patton, 2022).

Propulsi nuklir menawarkan “keunggulan yang tidak ambigu” dibandingkan kapal selam bertenaga diesel, tetapi ini tidak boleh “dilebih-lebihkan” (Graham Euan, 2017). Kapal selam bertenaga nuklir dapat menyelam lebih lama, tidak seperti kapal selam diesel-listrik yang perlu muncul beberapa kali Kembali ke permukaan. Maka dari itu secara teori akan tidak terdeteksi lebih lama. Namun, negara tidak selalu lebih tenang dan membutuhkan infrastruktur dan pemeliharaan yang lebih mahal. Selanjutnya yang dimaksud dengan non-proliferasi merupakan kesepakatan kapal selam AUKUS hanya berkaitan dengan propulsi nuklir angkatan laut maka tidak melibatkan transfer senjata nuklir ke Australia. Dengan demikian, AUKUS tidak bertentangan dengan *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT). (International Atomic Energy Agency, 1972).

NPT melarang negara-negara senjata non-nuklir untuk memperoleh senjata nuklir dan teknologi terkait senjata dan senjata nuklir yang dinyatakan memberikan bantuan apa pun untuk tujuan ini. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir dapat mengakses teknologi nuklir untuk tujuan damai. Perjanjian Perlindungan Komprehensif IAEA mengizinkan negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk menarik bahan nuklir dari perlindungan untuk digunakan dalam “aktivitas militer yang tidak dilarang”, yaitu reaktor angkatan laut yang tidak bertentangan dengan *South Pacific Nuclear Free Zone Treaty*. Perjanjian tersebut melarang perolehan, kepemilikan, penempatan, dan pengujian senjata nuklir di zona perjanjian tetapi tidak mencakup propulsi nuklir (International Atomic Energy Agency, 1972).

Selandia Baru, yang merupakan penandatangan perjanjian dan memiliki

sikap anti nuklir lama, telah menyatakan bahwa kapal selam nuklir baru Australia tidak akan diizinkan di perairan teritorialnya (The Guardian, 2021). Sementara kesepakatan AUKUS tidak bertentangan dengan kewajiban perjanjian apa pun. Kekhawatiran bahwa kesepakatan itu menjadi preseden buruk bagi upaya non-proliferasi nuklir secara lebih luas meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ahli. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa kesepakatan itu menciptakan preseden bahwa Amerika Serikat khususnya akan berjuang untuk mencegah dari “berkembang biak di luar kendali di seluruh dunia” (Philippe, 2021). Kesepakatan preseden untuk kebijakan non-proliferasi nuklir adalah bagaimana pengaturan “masalah yang meresahkan”, karena memungkinkan Australia menjadi negara senjata non-nuklir pertama yang menghapus bahan nuklir dari pengamanan dan inspeksi IAEA. Kekhawatiran nyata bahwa Australia akan menyalahi aturan penggunaan nuklir.

Namun timbul kekhawatiran bahwa penghapusan ini akan menjadi preseden yang merusak. Di masa depan, calon proliferasi dapat menggunakan program reaktor angkatan laut sebagai kedok untuk pengembangan senjata nuklir dengan harapan yang masuk akal bahwa preseden Australia, mereka tidak akan menghadapi biaya yang tidak dapat ditoleransi untuk melakukannya. Sébastien Philippe (2021) menyoroti potensi sekutu Amerika Serikat lainnya, seperti Korea Selatan untuk meminta pengaturan serupa kepada Washington atau potensi kerjasama reaktor angkatan laut antara negara lain seperti Rusia dan China untuk mengimbangi AUKUS. Meningkatkan prospek calon negara nuklir seperti Iran, mengeksploitasi preseden yang diciptakannya untuk berpotensi mengalihkan

bahan nuklir ke dalam program senjata nuklir.

Hingga saat ini, komitmen Amerika Serikat untuk non-proliferasi yang tanpa henti menghancurkan atau sangat membatasi aspirasi ini terhadap teknologi kapal selam bertenaga nuklir. Beberapa analis telah membandingkan kesepakatan AUKUS dengan kesepakatan kerja sama nuklir sipil Amerika Serikat-India pada tahun 2008 di mana George Perkovich dicap sebagai “penegakan selektif” aturan non-proliferasi internasional. Elemen lain dari kesepakatan AUKUS yang menimbulkan kekhawatiran seperti akuisisi Australia atas serangan darat *Tomahawk* dan rudal jarak jauh dari Amerika Serikat (Philippe, 2021). Meskipun tidak bertentangan secara langsung dengan *Missile Technology Control Regime* (MTCR) (House Of Commons Library, 2016).

Pengekangan terhadap transfer teknologi rudal yang melekat pada rezim tersebut berpotensi dirusak dan menjadi preseden berbahaya bagi negara lain. Kekhawatiran terhadap China di negara-negara di kawasan Indo-Pasifik bermula dari tindakan agresif mereka di beberapa bagian kawasan terutama di perairan Laut China Selatan. China menunjukkan sikap yang tidak segan-segan dalam menghadapi negara lain seperti menghadapi Filipina dan melakukan beberapa pelanggaran perbatasan di kawasan seperti pelanggaran perbatasan di Indonesia. Hal ini membantu Australia mempersiapkan kekuatan yang lebih baik untuk mengatasi agresi ini dan melindungi kedaulatan negara lain dari visi predator China melalui peta sembilan garis putus-putus demi mencapai tujuan diplomatik (Goodman MP, 2017).

Di sisi lain, AUKUS juga merupakan ekspresi dari pendekatan multilateral Amerika Serikat untuk mempertahankan supremasinya di kawasan, serta mencegah ambisi China

untuk menjadi negara yang paling kuat yang menang atas kepentingan bersama di kawasan (Phua A.T, 2021). Perubahan rencana dan strategi Australia dapat dilihat sebagai langkah logis karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dipandang telah mendorong negara keluar dari perang dan menghindari konflik untuk mempromosikan perdamaian dunia, dunia menjadi janji palsu bahwa dalam perkembangannya tidak dapat menghalangi agresi China (J.J, Mearsheimer, p. 1994). Berikut ini adalah peta Pangkalan Militer AS dan China di Indo-Pasifik serta peta realisasi Perjanjian AUKUS kita lihat kekuatan militer dari negara yang ikut serta pada Pakta Perjanjian AUKUS (AUS, UK, US) serta kekuatan militer negara Asia Tenggara yang ada pada dan gambar berikut:

### **Tanggapan Negara Anggota ASEAN Serta Kepentingan Nasionalnya**

Perjanjian AUKUS menguji kemampuan Asia Tenggara untuk bekerja sama. Negara-negara ASEAN akan menghadapi dilema keamanan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan terorisme. Di sisi lain, pasokan kapal selam nuklir Amerika Serikat dan Inggris ke Australia niscaya akan membuka babak baru perlombaan senjata di kawasan ASEAN. Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara anggota ASEAN lainnya telah bekerjasama untuk mengadopsi metode tradisional. Kapal selam dan kapal permukaan lainnya dari Indonesia, Jerman dan Rusia dari awal abad ke-21. Negara-negara Asia Tenggara memiliki ketakutan bagaimana wilayah mereka berada di garis depan konflik masa depan di Amerika Serikat dan China. Pada tingkat yang lebih dalam, persepsi Asia Tenggara dan Amerika Serikat tentang ancaman dari China bervariasi dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Terlepas



Tabel 1  
Global Military Strength Ranking 2022

COUNTRY	MILITARY GLOBAL RANKED 2022	POWER INDEX SCORE	ACTIVE & RESERVE PERSONNEL	DEFENSE BUDGET
US	1	0.0453	1.390.000 & 442.000	\$ 770.000.000.000
UK	8	0.1382	194.000 & 37.000	\$ 68.000.000.000
CHINA	3	0.0511	2.000.000 & 510.000	\$ 230.000.000.000
AUS	17	0.2377	59.000 & 20.000	\$ 44.618.000.000

Sumber: Globalfirepower.com, 2022 .

Tabel 2  
5th Highest Southeast Asia Military Powers Ranked 2022

COUNTRY	MILITARY GLOBAL RANKED 2022	POWER INDEX SCORE	ACTIVE & RESERVE PERSONNEL	DEFENSE BUDGET
INDONESIA	1	0.2251	400.000 & 400.000	\$ 9.300.000.000
VIETNAM	2	0.4521	194.000 & 37.000	\$ 6.237.600.000
THAILAND	3	0.4581	2.000.000 & 510.000	\$ 2.933.600.000
MYANMAR	4	0.5972	59.000 & 20.000	\$ 2.285.700.000
SINGAPORE	5	0.6253	200.000	\$ 11.560.000.000

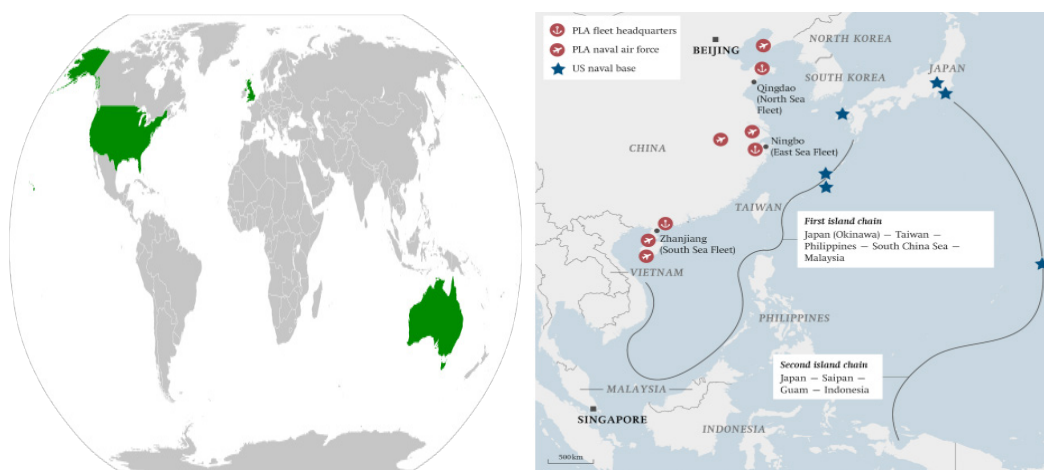
Sumber: Globalfirepower.com, 2022 .

Tabel 3  
4<sup>th</sup> Lowest Southeast Asia Military Powers Ranked 2022

COUNTRY	MILITARY GLOBAL RANKED 2022	POWER INDEX SCORE	ACTIVE & RESERVE PERSONNEL	DEFENSE BUDGET
MALAYSIA	6	0.7091	115.000 & 52.000	\$ 3.792.819.200
PHILIPPINES	7	0.8076	130.000 & 100.000	\$ 4.390.000.000
CAMBODIA	8	2.3944	100.000 & 0	\$ 632. 500.000
LAOS	9	3.6906	25.000 & 0	\$ 38.280.000

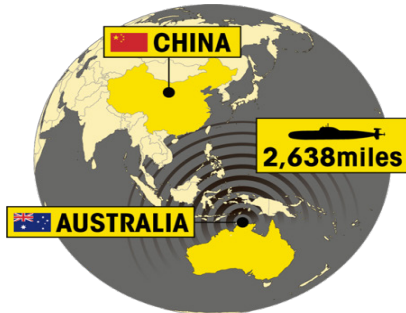
Sumber: Globalfirepower.com, 2022.

Gambar 1  
Peta Aukus & China

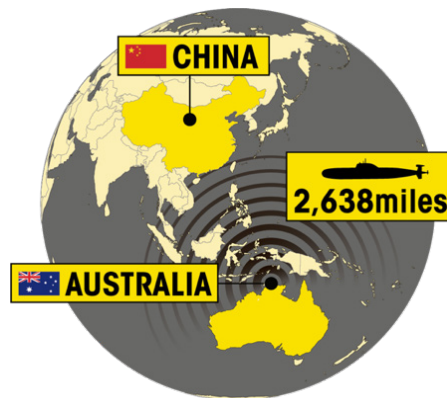


Sumber: Lippert & Perthes, 2020.

Gambar 2  
Peta AUKUS, ASEAN & QUAD



Sumber: GISreportsonline.com, 2021.



Sumber: eouronewssource.com, 2021.

dari ketakutan akan hegemoni China di masa depan, kawasan ini sebagian besar dimotivasi oleh sikap dominan Amerika Serikat terhadap persaingan dengan China sebagai bagian dari perjuangan persaingan global antara demokrasi dan kekuasaan. Sejak 2010, situasi di Laut China Selatan memburuk membuat negara-negara tersebut mempercepat modernisasi Angkatan Laut mereka dengan mengakuisisi kapal-kapal baru. Namun, kapal selam nuklir memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan kapal selam tradisional. Kapal selam nuklir sangat kuat dan cepat, menjadikannya kekuatan *offensive* dan *defensive* yang tangguh. Mereka juga sering dipersenjatai dengan rudal nuklir,

membuatnya semakin berbahaya. Akibatnya, ASEAN akan menghadapi kekuatan militer yang berkembang pesat ke negara-negara tetangga. Sementara itu, negara-negara ASEAN selalu mengupayakan keseimbangan strategis di antara kekuatan-kekuatan besar untuk menjamin keamanan (Prabowo E. E., 2013).

Kecenderungan Amerika Serikat untuk mendasarkan kebijakannya pada strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) harus cukup untuk memastikan bahwa tindakan yang diambilnya melalui teknologi terhadap AUKUS dirancang sebagai penyeimbang yang baik dan menghidupkan kembali gagasan sistem berdasarkan tatanan aturan internasional

Gambar 3  
Peta Indo-Pasific



Sumber: The Economist.com, 2021.

di kawasan Indo-Pasifik. Namun jika melihat sulitnya mencapai kesatuan posisi dalam situasi tertentu, seperti isu Uyghur di Myanmar yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih dalam keadaan yang kacau. Dengan lahirnya AUKUS maka raksasa akan muncul dari Asia Tenggara hingga Pasifik Selatan. Dibandingkan dengan Eropa, integrasi politik dan keamanan ASEAN masih terbilang rendah serta kebijakan keamanan, diplomatik dan pertahanan negara-negara anggota ASEAN tidak dicapai. Negara-negara anggota tidak dapat bergantung pada pertahanan kolektif ASEAN untuk keamanan bersama tetapi justru harus mengembangkan kekuatan militer mereka sendiri untuk memastikan keamanan mereka sendiri. Akibatnya, ASEAN akan menghadapi bahaya dengan mempercepat kekuatan untuk menyeimbangkan kekuatan. Dilema keamanan juga timbul dari potensi untuk melemahkan upaya ASEAN untuk memastikan wilayah tanpa senjata nuklir.

Pada Desember 1995, negara-negara anggota ASEAN menandatangani perjanjian tentang zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara, perjanjian Sienfez menetapkan: (1) Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir; (2) mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional; (3) dan melarang produksi, pengujian serta kepemilikan senjata nuklir di Asia Tenggara. Tidak seperti China, yang merupakan negara pertama dari lima negara bersenjata nuklir yang menyetujui Traktat SEANWFZ dan menandatangani Protokol untuknya, Amerika Serikat tidak memenuhi semua dasar perjanjian dan teks Protokol. Kekhawatiran dan penolakan telah memutuskan untuk serius dalam pertimbangan penandatanganan Protokol. AUKUS akan memperkuat persaingan yang sudah sengit antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan, mengungkapkan potensi risiko perlombaan senjata dan konflik antara kekuatan-kekuatan besar. Dampak lainnya adalah dapat merusak

kemakmuran, perdamaian dan stabilitas kawasan (Phua A.T, 2021).

Bagi negara-negara ASEAN, bagaimana mempertahankan sentralitasnya dan keluar dari pusaran persaingan di antara negara-negara besar selalu menjadi isu yang tidak dapat dihindari di tingkat diplomatik dan strategis. Amerika Serikat telah berulang kali menekankan bahwa tidak ingin negara-negara ASEAN memilih antara China dan Amerika Serikat, tetapi pembentukan aliansi AUKUS menunjukkan bahwa kubu anti-China yang dipimpin Amerika Serikat sudah mulai kerepotan. Asia Tenggara merupakan kawasan yang memainkan peran penting dalam menentukan masa depan Asia dan apakah Amerika Serikat dapat berhasil menerapkan strateginya untuk mengklaim statusnya sebagai kekuatan Asia-Pasifik (GIS Dossier, 2021). Amerika Serikat tidak begitu saja menerima bahwa kurangnya kerja sama ASEAN akan membahayakan atau menghambat kebijakan penahanannya terhadap China. Di sisi lain, China adalah tetangga alami ASEAN dan mitra ekonomi maupun perdagangan yang tak tergantikan.

ASEAN menyadari bahwa upaya-upaya yang dilakukan secara berdampingan itu merusak diri sendiri dan memiliki akibat yang fatal. Namun, lahirnya AUKUS mau tidak mau akan meningkatkan tekanan dari ASEAN terhadap masalah ini. Ketiga, AUKUS memecah belah ASEAN dan mengganggu proses integrasi politik dan keamanannya. Reaksi negara-negara anggota ASEAN terhadap AUKUS beragam. Menteri Luar Negeri Filipina Theodoro Lopecin Jr. mendukung AUKUS dan meningkatkan kemampuan sekutu dekat asingnya untuk memproyeksikan kekuatan, daripada mengacaukannya, memulihkan dan menjaga

keseimbangan. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa meskipun AUKUS merupakan respon atas kehadiran militer China yang semakin meningkat dan ketegangan di Laut China Selatan, sebenarnya merupakan kekuatan yang menopang wilayah tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Indonesia. Keikutsertaan unsur nuklir pada konvensi AUKUS dapat dilihat sebagai respon terhadap perubahan kondisi strategis (Phua A.T, 2021).

Penolakan Indonesia dan Malaysia yang merupakan tanda keprihatinan AUKUS tampaknya tidak serta merta membuat negara ASEAN lain menerimanya. Sebagai contoh, Filipina sebagai salah satu negara yang sering berkonflik dengan China menunjukkan dukungannya terhadap kemitraan AUKUS, yang menurut Manila dapat mengimbangi kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik. Filipina juga telah menyatakan bahwa, tanpa membangun senjata nuklir, upaya membangun kapal bertenaga nuklir tidak akan melanggar perjanjian non-proliferasi. Sebagai sekutu selama beberapa dekade, Filipina tentu sangat bergantung dalam hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional secara umum. Kondisi ini pasti akan menyenangkan Manila jika Washington dapat secara sah memperkuat kehadiran militernya di Asia Tenggara dengan cara apa pun, terutama karena Filipina semakin terlibat dalam kompetisi Laut China Selatan.

Dari sudut pandang Filipina AUKUS tentu saja merupakan tawaran yang bagus untuk negara-negara di luar kawasan karena konvensi kapal selam AUKUS akan menjadi upaya yang kuat untuk membatasi penggunaan militer China juga untuk kepentingan nasional mereka dalam mengamankan posisi. Selain itu, strategi yang disiapkan Australia juga akan memberikan efek jera terhadap China. Hal tersebut menjadi acuan penghitungan

ulang terkait penggunaan militernya untuk menghindari berkobarnya masalah yang tidak lagi menguntungkan Beijing (D, Reiter, 1999).

Selanjutnya, Singapura, tetangga Indonesia melalui Duta Besar untuk Indonesia Anil Kumar Nayar, mengatakan Singapura menyambut baik komitmen Australia agar AUKUS dapat memajukan dan menjaga stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik. Menteri Singapura Lee Hsien Loong berbicara dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada 16 September 2021 dan meninjau interaksi bilateral dan multilateral lama Singapura dengan Australia, Inggris, dan US. Perdana Menteri Singapura mengatakan dia berharap AUKUS akan berkontribusi secara konstruktif untuk perdamaian dan stabilitas tempat dan melengkapi arsitekturnya, karena AUKUS tidak secara langsung mendukung sentralitas kerja sama ekonomi dan keamanan ASEAN dan Asia-Pasifik termasuk penerapan aturan internasional seperti Konvensi UNCLOS 1982 tentang Hukum Laut.

Le Thi Thu Hang menyatakan pernyataan yang serupa dengan Filipina dan Singapura, karena Vietnam terus memantau perkembangan geopolitik kawasan, dan Hanoi dapat menafsirkan dukungan rahasia daripada oposisi. Dia menekankan mengambil posisi netral sehubungan dengan AUKUS dan kapal selam Australia. Vietnam sangat mendukung tatanan berbasis aturan internasional di Indo-Pasifik yang konsisten dengan komitmen AUKUS sebagai subjek paksaan China (Phua A.T, 2021). Negara-negara Asia Tenggara memperjelas bahwa mereka tidak ingin berpartisipasi dalam politik kekuasaan yang berlangsung di Indo-Pasifik antara Amerika Serikat dan China. Dengan demikian, kondisi

keamanan yang ada tetap terjaga.

AUKUS dapat digolongkan sebagai upaya untuk melawan pernyataan China bahwa hal itu tidak menimbulkan risiko serius bagi negara tetangganya, terutama negara-negara ASEAN. Negara-negara lain di Indo-Pasifik juga harus mengakui bahwa memburuknya hubungan Australia dan China serta meningkatnya aktivitas militer China di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Hal tersebut merupakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa situasi keamanan di kawasan itu sebenarnya semakin memburuk yang membutuhkan tindakan praktis melalui keseimbangan material baik ekonomi maupun militer.

Tidak dapat disangkal bahwa ASEAN merupakan entitas yang menempati tempat yang sentral dalam arsitektur keamanan regional dan perlu lebih terbuka terhadap peluang peningkatan keamanan yang timbul dari kerja sama dengan berbagai mekanisme regional negara-negara ASEAN mitra eksternal seperti Amerika Serikat. Hal tersebut mampu menumbuhkan kepercayaan strategis untuk mengurangi beberapa keraguan yang dimiliki di setiap negara. Kerja sama penyelesaian masalah keamanan seperti yang dilakukan Australia melalui AUKUS justru akan menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan ini sebenarnya tidak cukup rapuh untuk menjawab pertanyaan yang mungkin akan menimbulkan konflik yang sia-sia bahkan jika dalam perkembangannya, pemikiran liberal tidak benar-benar membangun landasan yang kokoh dalam hubungan internasional di wilayah Indo-Pasifik (Mearsheimer J.J, 1994-1995). Dalam mendukung konsep kawasan dimana kebijakan dirancang untuk mengurangi kendala sumber daya dan hambatan dalam hubungan antar negara di kawasan yang

bersangkutan diharapkan *strategic trust* akan menjamin kondisi keamanan dan memberikan dampak positif dari keberadaan AUKUS kepada pihak lain (Väyrynen R, 2003).

### **Implementasi Pada Ketahanan Wilayah Indonesia**

Pada tanggal 2, 16 dan 20 September 1948 Bung Hatta berpidato terkait dengan cita-cita bangsa Indonesia bukan hanya sebatas untuk mencapai kemerdekaan. Akan tetapi sejak dulu para pemimpin pergerakan rakyat dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia merdeka dan berdaulat hanya sebagai syarat serta menjadi suatu landasan agar mencapai susunan penghidupan yang adil untuk dapat menjamin kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, selalu dikemukakan semboyan yaitu Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai cita-cita itu Indonesia bukan hanya sebatas keperluan saja tetapi sebuah keharusan untuk bekerjasama serta memiliki hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa yang lain.

Untuk memahami pentingnya Indonesia dari perspektif geopolitik secara global, lokal dan nasional maka para pemimpin nasional maupun elit politik diharuskan untuk memahami wawasan Nusantara. Persatuan nasional dan keutuhan wilayah nusantara untuk mencapai tujuan nasional dan mengharapkan kepentingan nasional didahulukan dari kepentingan individu, kelompok, daerah dan lainnya (luar negeri). Wilayah Indonesia yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki wilayah perairan dan yurisdiksi nasional yang luas dan masih banyak lagi. Harus diakui bahwa kedirgantaraan terlibat dengan potensi yang sangat besar dari sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan, mengelola, dan menggunakan potensi tersebut

agar dapat bertindak adil untuk segera keluar dari krisis dan merata. (H. Budi Santoso S, 2000)

Pokok politik luar negeri Indonesia meliputi politik damai, bersahabat dengan segala bangsa dengan atas dasar saling menghargai dengan cara tidak mencampuri hal struktur dan corak pemerintah negeri masing-masing. Memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang memiliki nasib yang sama dengan Indonesia di masa lalu maupun dengan negara yang memiliki perbedaan ideologi negara. Memperkuat hukum internasional serta organisasi internasional agar terjaminnya perdamaian yang kekal. Selalu berusaha untuk mempermudah jalannya transaksi ekspor maupun impor di dunia internasional demi ekonomi Indonesia. Membantu pelaksanaan keadilan sosial di dunia internasional dengan pedoman piagam PBB, terutama pasal 1, 2 dan 55. Berusaha di lingkungan PBB agar mencapai kemerdekaan bangsa-bangsa yang negerinya masih terjajah karena jika tidak adanya kemerdekaan maka tidak akan tercapainya persaudaraan serta perdamaian internasional.

Indonesia telah memutuskan untuk melakukan politik luar negeri yang bebas. Untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas maka kepentingan rakyat yang harus menjadi pedoman. Di samping itu pemerintah harus berusaha untuk membantu setiap usaha untuk perdamaian dunia. Politik luar negeri bebas aktif merupakan prinsip yang tepat untuk menghadapi dua kekuasaan yang saling bertentangan juga mencari kawan. Dengan politik bebas aktif, pemerintah melalui jalan yang nyata maka Indonesia dapat membantu dengan cara perdamaian (*conflict preventive*). Sikap bebas dalam hubungan luar negeri yaitu tidak memilih pihak untuk selamanya mengikat

diri dengan salah satu dari dua blok itu. Tidak mengikat diri untuk selamanya tidak turut campur yaitu bersikap netral sebagai penengah dalam setiap konflik yang ada. Politik bebas aktif bukan sebagai politik yang oportunis dengan hanya menghitung keuntungan serta kerugian yang tidak berdasarkan kepada cita-cita yang luhur.

Politik Indonesia bukanlah politik yang hanya sekedar netral karena politiknya tidak hanya ditujukan kepada negara yang berperang tetapi sikap dalam perdamaian yang ditujukan untuk memperkuat serta tujuan perdamaian. Netral dalam artiannya Indonesia harus memiliki sikap yang tegas yaitu misi perdamaian menjadi penengah dalam setiap konflik bukan hanya netral dalam artiannya ke sana-sini mengikuti seperti bunglon tetapi sikap Indonesia terhadap kedua blok besar yang memiliki konflik. Indonesia tidak memilih pihak manapun melainkan Indonesia mengambil jalan tersendiri ataupun menjadi mediator untuk menghadapi berbagai masalah internasional karena hal itulah yang menjadikan politik bebas aktif Indonesia dengan sebutan politik bebas atau "*independent policy*" dengan memegang teguh prinsip Pancasila.

Bahwa aktif dengan berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian serta mengurangi konflik yang ada sesuai dengan visi-misi PBB. Pemerintah Indonesia harus aktif mau tidak mau dalam segala usaha pelaksanaan perdamaian dunia dengan cara memegang teguh dasar ideologis yang bersandarkan pada Pancasila maupun materiil yang berdasarkan pada kekayaan alam Indonesia maupun kepentingan rakyat Indonesia. Politik bebas yang aktif Indonesia dalam konflik yang timbul dari pertentangan antara dua blok tetap berdasarkan sikap pada kebebasan dengan niat dan tujuannya

sebagai anggota yang bersungguh-sungguh loyaltasnya dari PBB. Pandangan tentang bagaimana kepentingan negara dan bangsa yang berpengaruh besar baik saat ini dan masa depan.

Pada saat ini politik bebas aktif Indonesia sudah tidak implementatif karena sudah kita ketahui bahwa politik Indonesia menjadi politik netralitas bukan seperti yang seharusnya yaitu politik bebas aktif. Netralitas saat ini menjadi memihak kepada pihak mana saja dan sikap yang seperti itu bukanlah mencerminkan negara yang memiliki ideologi dan sikap ini bukanlah sikap politik bebas aktif ala Bung Hatta seperti yang disebutkan di buku "Mendayung di Antara Dua Karang" tetapi lebih kepada politik multilateralisme yang fokus bekerjasama dengan negara manapun dengan tidak melihat isi dari Pancasila. Faktor objektif yang berpengaruh pada politik luar negeri Indonesia yang menjadi dasar adalah Pancasila yang bahkan saat ini mengapa dipertanyakan pada praktiknya.

Hubungan antar bangsa bagi kita sebagai bangsa yang mempunyai hubungan luar negeri kalau kita lihat sikap Indonesia dari Menteri luar negerinya seperti Indonesia netral dan terlihat tidak memiliki sikap maka selalu melihat dinamikanya bagi kita menterjemahkan filosofi politik luar negeri itu sendiri seperti apa bentuk bebas aktif itu sendiri di setiap pemerintahan dan hal itu sebenarnya yang paling penting. Bagaimana pemahamannya dengan praktiknya pasti dinamikanya berbeda seperti yang dikatakan tadi. Sepertinya itu tidak punya sikap seharusnya kalau kita lihat filosofi bangsa kita itu terutama dalam persoalan perang misalnya tidak bisa lagi seperti dulu yaitu kita cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan yang seharusnya itu juga tidak cukup. Tetapi itupun juga sudah berubah yaitu bagaimana kita untuk mencintai kedaulatan tapi dalam bentuk bebas aktif juga dikatakan bebas

aktif akan tetapi karena rezimnya itu yang membuat dinamikanya akan mengubah perspektif geopolitiknya menjadi bebas aktif yang artinya tidak bisa makna itu dibawa ke mana-mana tetapi bebas aktif yang nyata. Bukan berarti tidak punya sikap tetapi interpretative rezim itu akan berbeda (Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Armaidly Armawi, Kaprodi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional UGM, 2022).

AUKUS merupakan perpanjangan tangan atau *Proxy Strategy* dari US maupun NATO. AUKUS sendiri bukan hanya sebatas Kerja Sama Pertahanan tetapi lebih mengarah aliansi pertahanan untuk menghalau dominasi kekuatan China di Asia-Pasifik yang dapat mengakibatkan dampak yang besar bagi Asia-Pasifik serta terhimpitnya Asia Tenggara di tengah-tengah pilihan yang sulit. Adanya Perjanjian AUKUS hal ini adalah moment urgensi yang seharusnya ditanggapi dengan serius tetapi sikap itu tidak terlihat respond nya dari Kebijakan Luar Negeri yang diambil dari preferensi presiden yang beranggapan bahwa hal ini bukanlah hal yang essential sehingga di *overlook* atau *neglect* sehingga menjadikan kita terkesan tidak memiliki sikap.

Sengketa Laut China selatan berdampak kuat terhadap gelombang polarisasi negara-negara yang memiliki kepentingan terutama Amerika Serikat dan China yang memperebutkan pengaruhnya di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Konflik yang bersifat strategis perlu dianalisis karena cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi situasi global, regional maupun nasional di Indonesia. Banyaknya kekuatan militer dari negara-negara hegemoni yang hadir di kawasan Laut China Selatan juga berpotensi meningkatkan resiko kedinamisan hubungan internasional terkait sengketa Laut China Selatan. Secara tidak langsung, mungkin terjadi gangguan

pada lalu lintas maritim. Akibatnya akan terjadi peningkatan risiko, sehingga biaya asuransi dan logistik meningkat, yang berpotensi memicu krisis energi dan ekonomi (Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, 2017).

Sengketa di laut akan mendorong negara-negara yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan perang dari segala aspek baik dari personel, strategi equipmentnya mereka, sehingga meningkatkan potensi pecahnya perang. Secara umum, konflik antar negara mendorong nasionalisme yang dapat menyebabkan konflik horizontal antar manusia. Oleh karena itu, Indonesia perlu lebih memperhatikan keamanan wilayah lautnya. Aparat penegak hukum Indonesia harus memiliki kehadiran yang konstan dan selektif di laut, menunjukkan niat langsung atau tidak langsung. Mulai dari TNI Angkatan Laut, Bakamla Republik Indonesia hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketegasan dalam penerapan hukum tidak boleh dikompromikan. Jika terjadi pelanggaran, tetap diperlukan tindakan, baik di ZEE maupun di landas kontinen.

Selain itu, kita juga harus mampu mengeksplorasi atau mempertahankan sumber daya alam yang ada di ZEE maupun di landasan kontinen. Jangan hanya mengklaim di peta saat aksinya tidak ada. Tentang Laut China Selatan, tentunya Indonesia juga memiliki kepentingan nasional di Laut China Selatan. Kepentingan-kepentingan tersebut seperti perdamaian dan stabilitas di kawasan, kebebasan navigasi, hak berdaulat di ZEE menurut UNCLOS, kebebasan bekerjasama dengan negara manapun, kepentingan ekonomi, politik dan strategis dan tentunya kepentingan menjaga keamanan rakyat dan negara maupun kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, 2017).



Namun, kepentingan Indonesia terancam oleh keadaan Laut China Selatan saat ini, di mana China dan Amerika Serikat sedang berperang. Posisi Indonesia saat ini bukanlah *claimant state*, namun upaya China untuk merebut kembali Laut China Selatan kini sudah mulai menyerbu wilayah kedaulatan ZEE Indonesia kita di perairan Laut Natuna bagian utara. Selain itu, China sering berupaya membawa kapal penangkap ikannya untuk menangkap ikan di perairan ZEE dan landas kontinen Indonesia, dengan pengawalan ketat dari kapal *Coast Guard*-nya. Situasi ini menunjukkan bahwa China bertekad untuk menguasai Laut Natuna bagian utara juga dan wilayah tersebut juga dikenal memiliki nilai strategis.

Laut Natuna Utara merupakan jalur pelayaran internasional dan secara ekonomi kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Tindakan China ini tentunya merupakan ancaman bagi kedaulatan Republik Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan militer. Dari sisi ekonomi, kekayaan laut di Laut Natuna bagian utara akan berkurang karena stok ikan di perairan Indonesia akan semakin menipis akibat kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan China, dan juga negara lain seperti Vietnam, Philipina dan Thailand. Akibatnya nelayan Indonesia di Laut Natuna utara memiliki akses terbatas ke ZEE Indonesia. Selain itu, kegiatan penyelundupan akan meningkat sehingga merugikan industri nasional, belum lagi potensi impor barang-barang ilegal seperti obat-obatan, bahan peledak, pakaian ilegal, dll di perairan ZEE Indonesia tersebut. Sampai saat ini, sebagian besar produk dikirim ke Singapura dan Malaysia melalui pipa bawah laut. Jika perselisihan lebih sering muncul, biaya pengiriman barang ekspor Indonesia ke kawasan Asia Timur meningkat.

Potensi ancaman di bidang militer dapat dilihat pada potensi dua blok yaitu blok China dan blok ASEAN. Persaingan memperebutkan blok-blok tersebut diperparah dengan keterlibatan US melalui AUKUS, sehingga potensi konflik bersenjata sangat besar. Apalagi, klaim China di Laut China Selatan sangat berpotensi menimbulkan konflik bersenjata. Dari sudut pandang Indonesia, provokasi China terhadap Indonesia, termasuk pemaksaan terhadap kapal-kapal China yang mencari ikan, kemungkinan besar akan mendorong Indonesia untuk mengerahkan kekuatan militer di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara. Akhirnya, Indonesia begitu terpengaruh oleh kekuatan ganda Amerika Serikat dan China sehingga membatasi kebebasannya untuk membeli alutsista dan terseret ke medan perang. Apalagi Australia sudah memiliki kapal selam nuklir.

Indonesia merupakan kekuatan besar yang perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kedaulatan, terutama di bagian utara Laut Natuna. Berdasarkan hal tersebut, keterlibatan aktif Indonesia dalam mengatasi permasalahan di Laut China Selatan harus melalui upaya diplomasi. Upaya tersebut merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk menghindari gesekan yang besar di wilayah perairan. Indonesia harus menolak klaim China untuk menguasai Laut China Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus dan daerah penangkapan ikan tradisional. Ini dianggap tidak berdasar oleh hukum internasional. Indonesia mendukung putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 12 Juli 2016 (Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, 2017). Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan gencar mengawal kawasan Laut Natuna Utara. Perlunya perluasan kegiatan ekonomi di sekitar Laut Natuna Utara atau wilayah

ZEE Indonesia. Indonesia perlu memperkuat kapabilitas penegakan hukum di ZEE, khususnya di Kepulauan Natuna.

Untuk kepentingan AUKUS di Laut China Selatan, Indonesia harus tetap netral dalam politik luar negerinya. Indonesia harus dapat memanfaatkan keunggulan strategisnya dengan mengadopsi pendekatan yang melibatkan UK, US, Australia, dan bahkan Uni Eropa dalam masalah Laut China Selatan. Indonesia juga harus menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, termasuk melanjutkan kerja sama militer masa lalu tanpa terikat oleh kepentingan US di Laut China Selatan. Terakhir, di bawah program TNI, Indonesia dan Amerika Serikat melakukan latihan bersama di Kepulauan Natuna dan Laut Natuna bagian utara. TNI juga perlu mengambil langkah strategis, seperti membangun entitas yang terintegrasi. Dibentuk segera, unit ini akan terdiri dari unit TNI AD, Batalyon gabungan yang diperkuat oleh *Combat Engineer Company*, Batalyon Rudal Pertahanan Udara, dan Batalyon Artileri Lapangan.

Selain itu, TNI perlu membekali kesatuan dengan personel dan Alutsista yang diperlukan, seperti memperkuat TNI di pulau-pulau terpencil, menaikkan status Kodim menjadi Tipe A, dan membangun pangkalan kapal selam di Natuna, khusus untuk TNI Angkatan Laut. Kapal Selam Australia untuk menghadapi ancaman nuklir. Kemudian, perlu dilakukan kegiatan intelijen Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut secara sinergis, menanggapi kegiatan pelanggaran wilayah dan intelijen musuh, merespons secara positif, dan menyadarkan mereka akan kemungkinan membuka perang termasuk perang nuklir. Tanpa disadari, masyarakat internasional telah membuat asumsi luas

bahwa China memiliki pengaruh dan kendali atas perairan ini, serta kedaulatan penuh. Oleh karena itu, ancaman terhadap kawasan strategis yang mengancam kedaulatan negara memerlukan strategi terkait dengan isu keamanan nontradisional saat ini. Konsep keamanan tradisional yang berkembang selama ini sangat relevan dengan negara, dan ancaman terhadap negara yang berasal dari luar negeri sangat dekat dengan aspek militer wilayahnya.

Pada tahun 1980-an muncul konsep keamanan baru dalam kaitannya dengan keamanan nasional dan keamanan internasional. Konsep ini melengkapi pemahaman konsep keamanan yang bersumber dari persaingan kekuatan politik dan militer. Keamanan yang menyeluruh atau bersama dinyatakan berdasarkan prinsip-prinsip ini bahwa keamanan tidak dapat ditingkatkan tanpa meningkatkan keamanan negara lain. Masalah ancaman luar negeri yang dihadapi negara-negara terkait dengan keamanan nasional dipahami sebagai ancaman bagi keamanan internasional di seluruh dunia, terutama di wilayah-wilayah di mana masalah tersebut berkembang. Misalnya, pengembangan nuklir, kerusakan lingkungan, krisis ekonomi. Pemahaman konsep keamanan tradisional dan ide-ide baru disebabkan oleh erosi perbatasan, perkembangan teknologi dan saling ketergantungan antar negara, dan interaksi global tidak hanya meningkat di sisi militer, tetapi juga non-militer. Ini adalah situasi yang meluas ke sisi target. Masalah perdagangan, konflik, dan kepentingan bersama. Mungkin diatur dalam kerangka kerja sama regional untuk mencapai keuntungan bersama antara nasional dan non-negara, dan saat ini membutuhkan diskusi bersama antara para pihak untuk mengatasi masalah yang

muncul baik secara internal maupun eksternal (P.H Liotta, 2002).

Lingkungan global dari berbagai dimensi telah timbul masalah-masalah tertentu dalam tatanan dunia. Kerentanan terhadap ancaman dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer menyentuh isu-isu non-tradisional dengan lebih memperhatikan aktor non-negara (Teroris, LSM Internasional, dll). Dalam konsep keamanan dikenal adanya sumber ancaman. Gagasan keselamatan maritim sebagai isu keselamatan di masing-masing negara, beserta dampak dari masing-masing lingkungan eksternal dan respon dari negara-negara yang menganggap isu tersebut sebagai ancaman yang perlu segera dilakukan dengan penuh perhatian. Keamanan wilayah laut semakin relevan dengan perkembangan permasalahan yang semakin kompleks ini (Panji Suwarno, 2021).

Pemerintah harus mendesak agar China melaksanakan keputusan pengadilan internasional. Pemerintah harus menegaskan bahwa kerjasama dengan AUKUS menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan tindakannya melanggar hukum internasional, khususnya NPT. Pembagian Kepulauan Natuna menjadi negara bagian baru. Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI dan kementerian terkait meningkatkan kesiapan dan kapasitas di wilayah Laut Natuna Utara untuk mengamankan ZEE Indonesia dan aktif melakukan dialog bersama dengan pihak yang terlibat. Peningkatan anggaran operasi TNI di Laut China Selatan dan Pulau Natuna. (Hasil wawancara dengan Jerry Indrawan. M.Si (Han), Alumni Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, 2022)

Kemhan dan Mabes TNI terus memperkuat kemampuan Kogabwilhan I untuk menghadapi setiap dinamika yang

mungkin terjadi di wilayah Laut China Selatan dan Laut Natuna Utara. Pentagon telah memperkuat intelijen, pertahanan udara, dan kemampuan tempur jaringan-sentris di Pulau Natuna dan Laut China Selatan. Peningkatan sarana dan prasarana, serta tunjangan khusus bagi TNI yang bertugas di Natuna. Pembaruan doktrin pertahanan dalam menghadapi perang asimetris. Bekerja sama dengan ASEAN, dengan menekan China dan Aliansi AUKUS untuk mematuhi aturan hukum internasional, khususnya DOC (*Declaration on the Actions of Parties in the South China Sea*) (ASEAN, 2012)

Pertanyaan pun timbul mengenai dampak perjanjian AUKUS yang mampu menjadikan Laut China Selatan sebagai arena perang. Telah diketahui bahwa kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia lebih lemah jika dibandingkan dengan *Power States* (Hegemoni). *Rare Earth Elements* contohnya seperti *Lathanonid* yang sumbernya ada di Bangka Belitung dikuasai oleh AUS, UK, US maupun China dan menjadi potensi persaingan perdagangan (Dr. Ir. Sutarto M.T, 2020). Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Indonesia memiliki kontribusi terhadap peralatan perang dunia (Tri Sulistio, 2020). Sayangnya sumber daya alam (*Raw Mateials*) yang kita miliki tidak bisa dikembangkan untuk kebutuhan pertahanan Indonesia karena Indonesia tidak memiliki kemampuan finansial untuk industri pertahanan dan hanya mengandalkan pembelian Alutsista dari negara lain karena keterbatasan finansial maka Indonesia hanya sebatas memproduksi senjata konvensional atau Alutsista pendukung (Wangi Sinintya Mangkuto, 2019).

Indonesia merupakan nomor 1 kekuatan militer di Asia Tenggara sedangkan Indonesia tidak memiliki peralatan yang mumpuni

seperti kapal induk, kapal penghancur, kapal cepat serta maupun radar penyusup yang dapat mendetect dari jarak berapa ratus kilo (Global Fire Power, 2022). Bagaimana Indonesia dapat unjuk gigi pada sengketa Laut Natuna sedangkan natuna menjadi arena perang yang bersinggungan dengan militer yang jauh kekuatannya di atas Indonesia? Dalam seluruh aspek kehidupan termasuk bahasan tentang ketahanan dan keamanan suatu wilayah pada bangsa tentu tidak akan luput dari peran Sumber Daya Manusia. Bangsa Indonesia tidak cukup hanya memiliki satu kekuatan, tetapi harus memiliki banyak kekuatan. SDM itu dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan. *Indonesia Character Building* atau *Nations & Character Building* terus dibuktikan pertumbuhan grafiknya secara jelas dan terukur (Dr. rer. nat. Ir. Hj. R. Ngt Krisnani Setyowati, 2022). Setiap professional maupun rakyat adalah bela negara dengan memiliki pertahanan dan kekuatan yang sangat utuh baik mental maupun spirit seperti halnya jati diri bangsa. Pondasi dalam berbangsa di Indonesia melalui tahapan mental dan spiritual yang tangguh. Ini dibutuhkan secara mutlak agar loyalitas terpenuhi demi tegaknya kedaulatan NKRI (Dr. rer. nat. Ir. Hj. R. Ngt Krisnani Setyowati, 2022).

Semangat untuk menjadi obor penerang seluruh sisi kehidupan baik pertahanan, keamanan, sosial, budaya, ekonomi, Pendidikan, harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Harkat-martabat bangsa adalah salah satu kekuatan bangsa jadi tidak ada lagi yang meremehkan Indonesia dalam dunia internasional. Indonesia adalah salah satu mercuasuar dunia yang seharusnya bermartabat di mata dunia internasional. *Nation & Character Building* merupakan titik

tolak melejitnya bangsa Indonesia pada masa dahulu yang patut diteladani keunggulannya di dalam harkat martabat berbudi luhur, cinta damai, menyejukkan, memberi ketenangan serta kerahayuan. Kehalusan yang ditunjukkan kepada dunia telah terbukti dengan hadirnya salah satu dari 7 keajaiban dunia ada di Indonesia. Artinya seluruh harkat martabat bangsa di dunia tidak lepas dari Indonesia. Mengapa peran Indonesia dalam dunia internasional mengambil bebas aktif karena kesejukan tersebut harus memberi nilai bagi dunia, jangan menjadi pemicu perang. Indonesia tidak pernah menjajah bangsa manapun.

Maka dari itu, jangan sampai setiap bangsa memiliki keinginan menjajah bangsa lain. Indonesia berperan penuh “Keagungan” dan “Keluhuran” dalam penyelesaian konflik dengan dengan berbagai pihak. Dengan penuh “Kearifan”, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berupaya keras dengan mencegah pertumpahan darah. Toleransi itu ditekankan bukan tidak berdasar melainkan toleransi diberikan atas dasar kemuliaan. Negara Indonesia sepakat dengan meletakkan pondasi negara yaitu Pancasila. Dimana menghargai seluruh agama, keyakinan, strata sosial, kedudukan, serta Harkat-Martabat bangsa. Di dalam menegakkan perdamaian dunia, sepatutnya Indonesia menghargai lintas identitas dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana untuk pencegahan konflik nasional maupun konflik internasional. Satu-satunya negara yang negara yang ideologinya Pancasila adalah Indonesia karena Indonesia memiliki ideologi yang lintas identitas (Dr. rer. nat. Ir. Hj. R. Ngt Krisnani Setyowati, 2022).

## SIMPULAN

Masing-masing individu maupun negara memiliki ideologi dan cara pandang yang berbeda-beda tetapi dalam sisi kemanusiaan sama-sama menghargai perbedaan tersebut sebagai sesama manusia. Perbedaan pandangan dan segala macam perbedaan justru merupakan pengayaan dalam mengisi peradaban dunia. Jangan menilai suatu perbedaan di dalam kehidupan dan masing-masing negara dengan sudut pandang yang sempit. Keberadaan diri manusia yang terbangun dan terbentuk tentu disebabkan dengan berbagai asupan gizi yang masuk. Jika pemanfaatan tersebut menyimpang dari tujuan yang ditetapkan dalam kemanusiaan tentu hal ini melemahkan harkat martabat manusia karena melanggar hak asasi manusia, hak hidup dalam keadaan perang itu terancam. Setiap saat nyawa bisa melayang, lalu apakah artinya perang jika hanya bertujuan mematikan kehidupan yang telah susah payah dilakukan sejak bayi sampai remaja, dewasa dan tua kalau hidup itu tidak tenang.

Keberadaan diri manusia bukan atas kehendaknya lahir ke dunia. Setiap anak manusia korban perang adalah tanggung jawab yang besar di saat perang terjadi oleh yang berperang. Semoga bangsa Indonesia memberi kontribusi yang besar bagi ketahanan Asia Tenggara dan tidak memicu konflik bilateral dan multilateral sebagai peyumbang integritas bangsa di Asia Tenggara dan dunia. Indonesia sebagai negara yang netral jangan sampai menjadi bangsa yang terombang ambing. Menjadi jati diri bangsa yang bijak dalam menyikapi semua hal yang terjadi di seluruh kehidupan sesuai warisan luhur dari kakek nenek moyang. Seperti Indonesia yang menjadi negara non-blok. Sikap daripada pemimpin negara akankah menjadi bunglon atau tetap bersikukuh pada jati dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agency, I. A., 1972, *The Structure and Content of Agreements Between the Agency and States Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, IAEA in Austria.
- ASEAN, 2012, *Declaration on The Conduct of Parties in the South China Sea*, Diakses di <<https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>>
- Baylis, J., 2008, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press.
- Brooke, L., Curtis, J., & Holland, C. M., 2021, *The AUKUS Agreement Research Briefing*, House of Commons Library.
- Corben, T., Townshend, A., & Patton, S., 2021, *What Is the AUKUS Partnership?* United States Studies Centre, Retrieved from United States Studies Centre.
- Dan, R., 1999, "Military Strategy and The Outbreak of International Conflict", *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 43 No.3, hh. 366-387.
- Dr. Yayat Ruyat, M, 2017, "Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan". *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Vol. 5 No. 1, hh. 65-75.
- Fjader, C., 2014, "The Nation-State, Nation Security and Resilience in the Age of Globalization". *Journal Resilience*, Vol. 2 No.2, hh. 114-129.
- GIS Dossier, 2021, *How AUKUS Can Become a Powerful Security Actor*. Diakses di <<https://www.gisreportsonline.com/r/aukus-security/>>
- Global Fire Power, 2022, *2022 Military Strength Ranking*, GFP Annual

- Ranking. Diakses di < <https://www.globalfirepower.com/>>.
- Global Fire Power, 2022, Southeast Asian Military Powers Ranked (2022). Diakses di <<https://www.globalfirepower.com/>>.
- Goodman, M. P., 2017, "Predatory Economics and the China Challenge". CSIS, Vol 6. No. 11, hh. 1-2.
- Graham, E., 2021, Australia's Well Kept Nuclear Submarine Secrets. Diakses di <<https://www.iiss.org/blogs/analysis/2021/09/australia-submarines>>
- Himawan, R., 2020, "Redefinisi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Ketahanan Regional di Asia Tenggara". LINO Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Vol.1 No.1, hh. 72-97.
- House of Commons Library, 2016, Nuclear Weapons: Disarmament and Non-Proliferation Regimes. Diakses di < <https://commonslibrary.parliament.uk/>>
- Kurniasih, D., & Umar, M., 2022, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara", Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 28 No.1, hh. 1-18.
- Lemhannas RI, 2017, "Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik". Jurnal Kajian LEMHANAS RI.
- Liolitta, P., 2002, "Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security", Security Dialogue, Vol. 4, hh. 473-488.
- Lippert B, P. V., 2020, "Strategic Rivalry between United States and China", SWP Research Paper, hh. 1-53.
- Mangkuto, W. S., 2019, Mengenal Rare Earth, Senjata Baru di Perang Dagang AS-China, CNBC Indonesia. Diakses di <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190529163407-4-75837/mengenal-rare-earth-senjata-baru-di-perang-dagang-as-china>>
- Mazzagatti, F., 2021, China Blasting AUKUS Defence Deal is Proof That It Was the Right Thing To Do. Diakses dari <<https://euronewssource.com/china-blasting-aukus-defence-deal-is-proof-that-it-was-the-right-thing-to-do/>>
- Mearsheimer, J. J., 1994, "False Promise of International Institutions". International Security Journal, Vol. 19 No. 3, hh. 5-49.
- Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda.
- Morrison, S., 2021, PM Transcripts. Diakses di <<https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-44110>>
- Mustafa, M., 2021, Philippines Throws Support Behind AUKUS Pact, Diakses di < <https://www.rfa.org/english/news/china/pact-09212021152655.html>>
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y.M., 2005, Pengantar Hubungan Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Phua, A.T., 2021), AUKUS: ASEAN's Hesitant Response. Diakses di <<https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/aukus-aseans-hesitant-response/#.YwKWC3ZBzIU>>
- Prabowo, E. E., 2013, "Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut China Selatan)". Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 19, No 3, hh. 118-129.
- Ratzel, F., 1988, Géographie politique. Translated by Pierre Rusch, Geneva,

- Éditions régionales européennes,  
Munich: Verlag von R. Oldenbourg.
- Santoso S, B., 2000, “Tegaknya Ketahanan Nasional Untuk Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan RI”. *Jurnal Ketahanan Nasional UGM*, Vol. 5 No.3, hh 75-82.
- Setyowati, D., 2006, “Pertumbuhan Jiwa Pancasila Pada Laboratorium Karakter Susilawati Susmono-Universal”, *Jurnal Lab Karakter Susilawati Susmono* Vol. 6.
- Sutarto, 2020, *Forum Geosaintis Muda Indonesia*. Diakses di <<https://fgmi.iagi.or.id/elearning/rare-earth-element/>>
- Väyrynen, R., 2003, “Regionalism: Old and New”, *International Studies Review*, Vol. 5 No.1, hh. 25–51.
- Stewart, I. J., 2021, *The Australian submarine agreement: Turning nuclear cooperation upside down*. Diakses di <<https://thebulletin.org/2021/09/the-australian-submarine-agreement-turning-nuclear-cooperation-upside-down/>>
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afabeta.
- Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F., 2021, *Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020)*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.27 No.1, hh 65-89.
- The Economist, 2021, *AUKUS reshapes the strategic landscape of the Indo-Pacific*. Diakses di <<https://www.economist.com/briefing/2021/09/25/aucus-reshapes-the-strategic-landscape-of-the-indo-pacific>>
- The Guardian, 2021, *AUKUS submarines banned from New Zealand as pact exposes divide with Western allies*. Diakses di <<https://www.theguardian.com/world/2021/sep/16/aucus-submarines-banned-as-pact-exposes-divide-between-new-zealand-and-western-allies>>
- Waltz, K. N., 1979, *Theory of International Politics*, California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Zhang, J., & Martin, J., 2021, *AUKUS Needs Economic Multilateralism*. Diakses di <<https://www.wilsoncenter.org/blog-post/aucus-needs-economic-multilateralism>>